IAI KAPj goes to Campus

Outlook Penerimaan Pajak Indonesia Tahun Anggaran 2019

Strategi dan Tantangannya

28.01.19

Permana Adi Saputra

Sekretaris Umum IAI KAPj

Agenda

- Pencapaian APBN 2018
- Realisasi Penerimaan Pajak 2014 – 2018
- Penerimaan Perpajakan 2015 – 2019
- Indikator Ekonomi Makro
- Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Tahun 2019
- Tantangan yang akan dihadapi pada Tahun 2019

Pencapaian APBN 2018

dalam trliun rupiah

	APBN 2018	Realisasi sd Desember 2018	% thd APBN
Pendapatan Negara (A)	1.894,72	1.942,34	102,51%
Belanja Negara (B)	2.220,66	2.202,24	99,17%
Kesimbangan Primer	(87,33)	(1,80)	2,06%
Surplus/Defisit Anggaran (A-B)	(325,94)	(259,90)	79,74%
Pembiayaan Anggaran	325,94	300,36	92,15%

Sumber: APBN Kita edisi Januari 2019

Pencapaian APBN 2018

dalam trliun rupiah

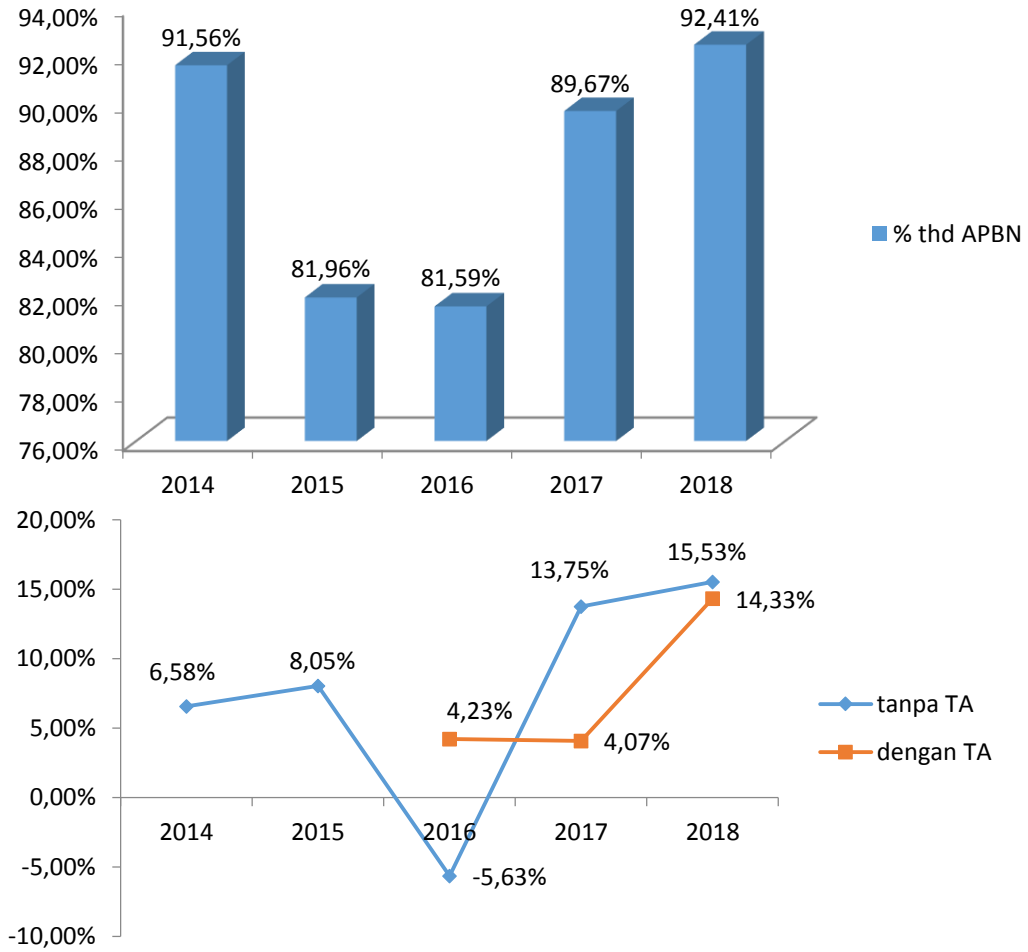
	APBN 2018	Realisasi sd Des 2018	% thd APBN
Pajak Penghasilan	855,13	751,49	87,88%
- Migas	38,13	64,69	169,64%
- Non Migas	817,00	686,80	84,08%
PPN & PPn BM	541,80	538,20	99,34%
PBB & Pajak Lainnya	27,06	26,24	96,97%
Pajak	**1.424,00**	**1.315,93**	**92,41%**
Bea Masuk	35,70	39,02	109,30%
Bea Keluar	3,00	6,76	225,40%
Cukai	155,40	159,69	102,80%
Kepabeanan dan Cukai	**194,10**	**205,47**	**105,9**
PNBP	**275,43**	**407,06**	**147,79%**

Sumber: APBN Kita edisi Januari 2019

Pencapaian APBN 2018

- Penerimaan pajak sebesar Rp 1.315,91 triliun (92,41% dari APBN 2018), atau tumbuh 14,32% dari realisasi tahun 2017. Pertumbuhan penerimaan pajak tersebut merupakan pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2012
- Kepabeanan dan Cukai tahun 2018 mencapai Rp 205,47 triliun (105,86% dari APBN 2018) atau tumbuh 6,74% dari realisasinya di tahun 2017. Pertumbuhan penerimaan kepabeanan dan cukai lebih tinggi dibandingkan rata-rata 5 tahun terakhir, yang hanya tumbuh 5,9%.
- Realisasi PNBP tercatat sebesar Rp407,06 triliun (147,79% dari APBN 2018), atau tumbuh 30,80% dari realisasi tahun 2017. Pertumbuhan PNBP tahun 2018 ini merupakan pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2009.
- Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp1.444,44 triliun (99,31% dari APBN 2018), atau 14,15% lebih tinggi dari realisasi tahun 2017.
- Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp757,79 triliun (98,91% dari APBN 2018), atau tumbuh 2,13 persen.

Realisasi Penerimaan Pajak 2014 - 2018

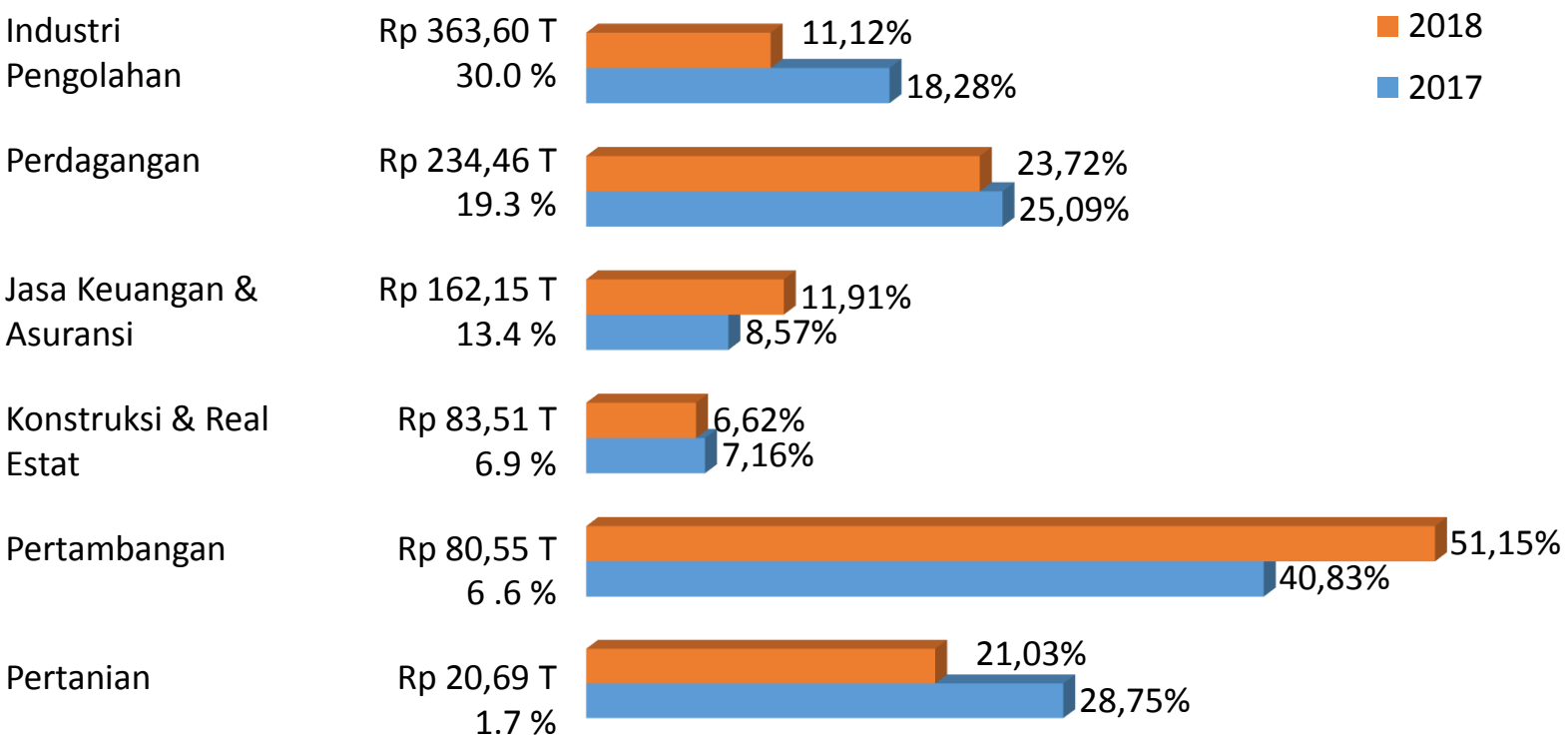


Tahun 2018 merupakan pencapaian tertinggi dari realisasi penerimaan pajak selama 5 tahun terakhir

Pada tahun 2018, tingkat pertumbuhan penerimaan pajak juga merupakan yang tertinggi selama 5 tahun terakhir, sehingga angka *tax ratio* Indonesia terhadap PDB meningkat dari 10,7 persen di tahun 2017, *menjadi* 11,5 persen di tahun 2018.

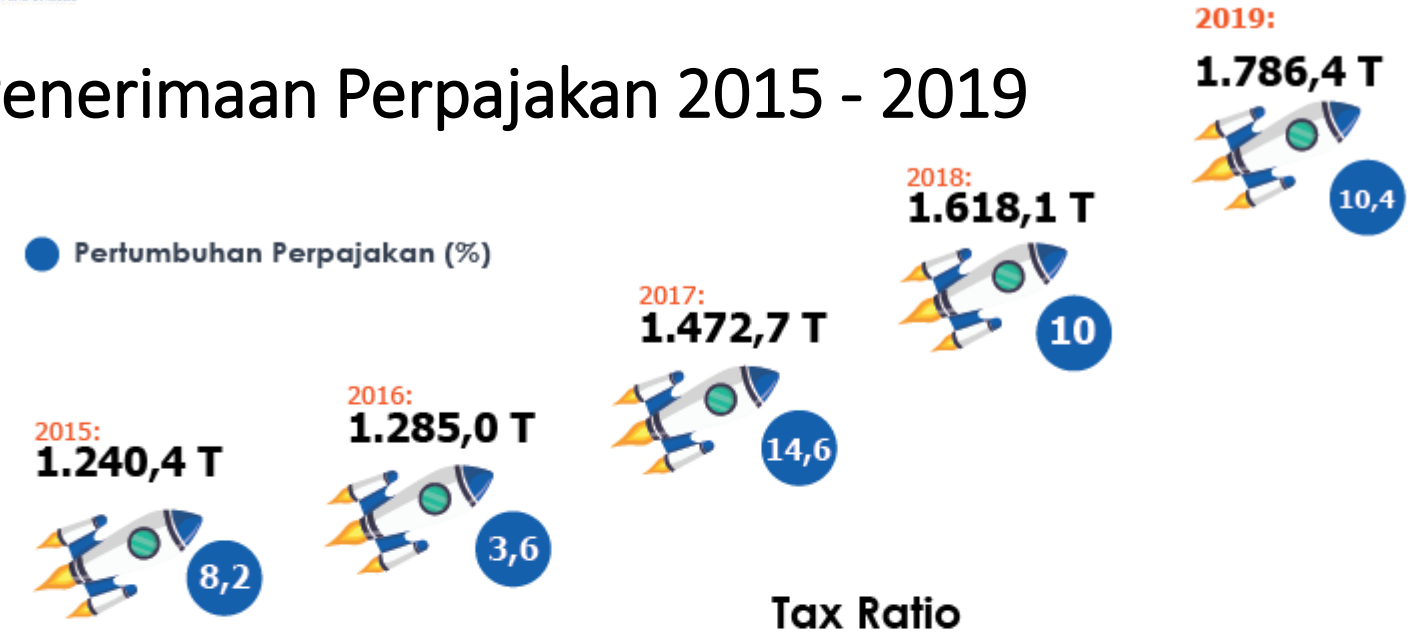
Sumber: APBN Kita edisi Januari 2019

Realisasi Penerimaan Pajak 2014 - 2018



Sumber: APBN Kita edisi Januari 2019

Penerimaan Perpajakan 2015 - 2019



Tax Ratio
12,2% PDB
Termasuk SDA migas & pertambangan

Target 2019:
1.786,4 T
(Outlook 2018: 1.548,5 T)
(RAPBN 2019: 1.781,0 T)

- Kepabean & Cukai **208,8 T**
- Penerimaan Pajak **1.577,6 T**
  - PPh Migas 66,2 T
  - Pajak non-Migas 1.511,4 T

Target penerimaan pajak meningkat 19,88% dibanding realisasi tahun 2018 sebesar Rp 1.315,93T

Sumber: www.kemenkeu .go.id /apbn2019

Indikator ekonomi makro

Indikator ekonomi makro yang menjadi basis perhitungan RAPBN 2019

Mempertimbangkan perkembangan terkini kondisi ekonomi, *outlook* serta prospek ke depan

Fokus RAPBN 2019

Efisiensi dan kualitas belanja prioritas →peningkatan SDM, perlindungan sosial, daya saing, investasi, dan infrastruktur

Mobilisasi Pendapatan secara realistis
→ Pajak untuk daya saing & investasi

Kesehatan fiskal→Produktif, Efisien, Daya Tahan, dan Sustainable

	Realisasi 2017	Outlook 2018	RAPBN 2019*
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1	5,2	5,3
Inflasi (% yoy)	3,6	3,5	3,5
Nilai Tukar (Rp/USD)	13.384	13.973	15.000
Suku Bunga SPN (%)	5,0	5,0	5,3
Harga Minyak (US$/barrel)	51	70	70
Lifting Minyak (ribu barrel/hari)	804	775	775
Lifting Gas (ribu barrel/hari)	1.142	1.116	1.250

Sumber: Arah Kebijakan Fiskal Pemerintah Tahun 2019

Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak pada Tahun 2019

- DJP dapat melakukan meningkatkan penerimaan pajak dengan meningkatkan jumlah wajib pajak terutama dari UMKM yang saat ini berjumlah 56 juta, dengan adanya kebijakan penurunan tarif PPh untuk UMKM menjadi 0,5% (PP23 Tahun 2018) dan aturan tentang tata cara dan prosedur pemajakan bagi para pelaku *e-commerce* yang berlaku mulai berlaku mulai 1 April 2019 (PMK No 210/PMK.010/2018).
- Penyesuaian tarif PPh 22 Impor atas 1147 pos dari 2,5% dan 7,5% menjadi 7,5% dan 10% (PMK 110/PMK.010/2018).
- Penggunaan Data *Automatic Exchange of Information* dan *Exchange of Information,* serta keterbukaan informasi keuangan untuk tujuan perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- Penerepan ketentuan-ketentuan terkait dengan perpajakan internasional terkait dengan penerapan BEPS Action di Indonesia, Seperti *Transfer Pricing, Treaty Abuse, Digital Economy* dan ketentuan perpajakan internasional lainnya.

Tantangan Yang dihadapi pada Tahun 2019

- Terjadinya perlambatan ekonomi yang dipengaruhi oleh faktor global dan domestik

  Faktor Global:

  - Perang dagang US vs China
  - Peningkatan suku bunga global yang dipicu oleh kenaikan suku bunga FFR
  - Pertumbuhan volume perdagangan global diperkirakan akan sedikit turun

  Faktr domestik

  - Tahun 2019 merupakan tahun politik karena adanya pemilihan umum presiden dan legislatif sehingga diperkirakan pada awal tahun masih mengalami perlambatan ekonomi.

Terima kasih